

Bencana dan Pengetahuan Lokal

Teuku Kemal Fasya

Hanya hujan dua hari pada 31 Oktober lalu, Aceh langsung ditelan bencana banjir dan tanah longsor. Hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh terendam, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser yang gembur seperti Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Bencana itu bukan saja membuat jaringan komunikasi sempat terputus selama hampir sehari, tapi juga melumpuhkan arus transportasi dan barang di pantai barat-selatan Aceh.

Di sisi bentangan Indonesia lain, kemarau panjang di wilayah timur Jawa, Bali, NTB, dan NTT telah menyebabkan gagalnya panen semesta. Teknologi modern melalui penciptaan hujan buatan dianggap terlalu mahal dan kurang efektif. Demikian pula bencana asap di Riau dan Sumatera Selatan telah melahirkan penderitaan, bukan saja masyarakat tempatan tapi juga bagi negara tetangga.

Dua fenomena ini menunjukkan bencana yang terjadi bukan kasus alamiah. Bencana merupakan konsekuensi hilangnya kebijaksanaan dan pengetahuan lokal atas alam. Alam cenderung dipahami secara "sekuler", eksploitatif, dan komersial.

Pengetahuan Lokal

Ada problem relasional antara pengetahuan modern terhadap lingkungan. Dalam banyak hal, perkembangan pengetahuan modern berempati kepada lingkungan untuk dilindungi dan dimanfaatkan dengan semangat keseimbangan (ekosentrisme).

Namun, uniknya masih banyak ilmuwan terpaku kepada positivisme pengetahuan modern secara "zakelijk" ketika memahami kebencanaan. Belum banyak upaya menjadikan pengetahuan masyarakat lokal (*local and indigenous knowledge*) sebagai salah satu cara membangun pengetahuan kebencanaan.

Bagi antropolog itu bukan barang baru. Penelitian-penelitian di komunitas terasing, rentan, dan pedalaman memang menjadi tujuan ilmiah. Penggiat antropologi menjadikan masyarakat yang kalah dalam pembangunan dan politik sebagai pemenang melalui praktik penelitian dan narasi.

Penelitian John McCarthy, antropolog lingkungan dari Murdoch University (*The Fourth Circle : A Political Ecology of Sumatera's Rainforest Frontier*, 2006) menjadi contoh untuk melihat bencana yang terjadi di wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai hutan lebat. Ia menggambarkan realitas masyarakat adat di pedalaman Aceh Selatan dan Aceh Tenggara yang mulai tersisihkan dari hutan adat mereka, kalah oleh logika eksploitasi pertambangan, hutan, dan politik agraria Orde Baru.

Kontradiksi pun terjadi. Hutan yang sebelumnya dekat dengan masyarakat menjadi properti asing dan terlarang. Masyarakat lokal heran. Rimba raya menurut keyakinan mereka "milik Allah", kini menjadi milik negara di tangan Soeharto. Kriminalisasi pun terjadi terhadap masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan. Sementara para penguasa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Penguasaan Hutan (HPH) menjarah hutan mereka besar-besaran. Perilaku deforestasi saat itu menjadi katastrofi yang memilukan dan memiskinkan masyarakat Aceh kini. Industrialisasi dan eksploitasi hutan menjadi mesin terminator, pencipta bencana dengan cepat dan meluas.

Padahal komunitas adat melalui pengetahuan lokalnya memiliki kemampuan resiliensif atau daya lenting atas fenomena lingkungan dan alam. Pengetahuan lokal masyarakat adat mampu merancang keseimbangan ekologis dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terukur. Hasil penelitian saya tentang peta demokrasi lokal di Aceh Besar beberapa waktu lalu menemukan bukti rusaknya struktur dan mentalitas demokrasi lokal berjalan paralel dengan rusaknya konservasi hutan dan hukum adat masyarakat.

Etnografi Bencana

Kini, pengetahuan modern yang mencoba mengatasi bencana secara artifisial harus bertemu muka dengan pengetahuan lokal yang kultural. Pertemuan itu bisa dilakukan melalui penelitian dan pendekatan etnografi.

Secara sederhana, etnografi menjadi mesin epistemologi untuk menafsirkan sebuah komunitas lokal melalui pendekatan induktif. Tujuannya mendapatkan "gambaran mendalam" (*thick description*: istilah Gilbert Ryle yang dipopulerkan antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz) atas kebudayaan masyarakat itu, memelihara aspek keunikan dan "irreducibility" mereka, memperkaya aspek politis dan puitisnya, dan tak mereduksi dengan pengalaman kebudayaan masyarakat lain (Mike Crang and Ian Cook, *Doing Ethnographies*, 2007 : 11).

Pendekatan ini ternyata menumbuhkan-kembangkan kajian antropologi lingkungan seperti yang mulai ramai dipublikasi (Benjamin S. Orlove, C. Warren, James C. Scott, T. Taale, Tania Li, dll). Pupuk kajian etnografi adalah keterlibatan dengan realitas melalui pendekatan empatik dan dengan

kacamata subjektif aktor (emik). Kedalaman pengetahuan atas budaya masyarakat akan mampu memberikan jalan bagi “pengetahuan alam” modern untuk menemukan solusi-solusi rekayasa lingkungan secara bijaksana.

Pengetahuan lokal akan ringkih jika harus berhadapan dengan pengetahuan modern secara setara. Aspek metodologi, gramatologi, dan narasi saja berbeda, maka tak layak dipertandingkan dalam sebuah arena yang sama. Reifikasi pengetahuan kebencanaan yang dipelajari di universitas dan industri harus terbuka kepada riset-riset etnografi lingkungan.

Maka, mengadvokasi pengetahuan lokal harus dengan strategi politis yang tegas. Seperti strategi poskolonialisme, berpihak pada masyarakat lokal. Tujuannya tak lain untuk penyelamatan ekologis, masyarakat, dan pembangunan secara bersamaan. Harus dipahami hukum domino pasti terjadi. Hilangnya pengetahuan dan kearifan lokal menjadi penanda hilangnya keseimbangan ekologis dan sosial, cikal-bakal tersulutnya bencana.

Masyarakat bisnis dan komunitas ilmiah harus semakin sensitif memahami bahwa rekayasa terhadap alam ada batasnya. Bencana alam adalah penanda kegagalan rekayasa pengetahuan dan kapitalisasi lingkungan akibat melewati batas yang dapat ditanggung oleh alam yang dibungkam itu.

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

www.siperubahan.com, 17 November 2014.